

POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK DI HINDIA BELANDA

Oleh:

Nastiti Muhasabah, Subaryana, YB Jurahman

Abstrak

Kebijakan pemerintah kolonial telah menyebabkan rakyat pribumi menderita, sehingga menimbulkan kritikan dari golongan liberal. Mereka berpendapat bahwa sudah selayaknya pemerintah kolonial meningkatkan kesejahteraan pribumi karena Hindia telah banyak memberikan kemakmuran bagi Belanda. Akhirnya muncullah sebuah kebijakan pemerintah kolonial yang dikenal sebagai Politik Etis yang program-programnya meliputi emigrasi, irigasi, dan edukasi.

Program edukasi pada masa Politik Etis telah memberikan kesempatan bagi anak-anak pribumi golongan tertentu untuk menempuh pendidikan Barat bahkan mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Dengan demikian pengetahuan anak-anak pribumi mengenai paham-paham Barat seperti liberalisme dan nasionalisme semakin luas sehingga membangkitkan kesadaran nasional di dalam diri mereka untuk melawan penjajahan. Para pemuda tidak lagi melakukan perjuangan melalui persenjataan, akan tetapi melalui organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi pergerakan tersebut antara lain Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Indische Partij, Jong Java, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partindo, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Meskipun corak dan aliran organisasi tersebut beragam, akan tetapi tujuan mereka sama, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Kata Kunci: *Politik Etis, Perkembangan Politik, Hindia Belanda*

Latar Belakang

Praktik kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan Belanda di Indonesia selama kurang lebih tiga setengah abad telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat. Dalam masa penjajahan yang panjang tersebut bangsa kita menjadi objek eksploitasi besar-besaran. Rakyat dirampas kebebasannya serta dieksploitasi tenaga dan sumber daya alamnya.

Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial memberikan keuntungan sepihak bagi pemerintah kolonial dan mengesampingkan kesejahteraan pribumi. Seperti yang disampaikan Kansil (1977: 17) bahwa perubahan kebijakan yang diterapkan Belanda tidak membawa kemajuan apa-apa bagi Hindia Belanda.

Muncullah kritik-kritik tajam terhadap pemerintah kolonial. Pada intinya kritik tersebut tidak menyetujui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Belanda karena hanya menguntungkan pihaknya. Kritikan tersebut nampaknya mendapat angin

segar pada peralihan abad ke-19 ke-20. Kebijakan yang melandasinya dikenal dengan Politik Etis. Salah seorang juru bicara terkemuka adalah van Deventer. Beliau mengemukakan tiga gagasan atau yang lebih dikenal dengan nama “Trilogi Van Deventer” yang meliputi irigasi, edukasi, migrasi (Sartono Kartodirdjo, 1999: 32).

Menurut Koch (Suhartono, 1994: 17) pelaksanaan politik etis telah membangunkan golongan elite untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Politik etis merupakan peluang yang dimanfaatkan sungguh-sungguh oleh para elite untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk membebaskan diri dari dominasi pemerintah kolonial. Pada Penelitian ini penulis kemudian memfokuskan pada politik etis dan pengaruhnya terhadap politik di Hindia Belanda.

Latar Belakang Munculnya Politik Etis

Keuangan di Hindia Belanda kembali mengalami kemerosotan setelah jatuhnya harga kopi di pasaran dunia sekitar tahun 1820-an (Wiharyanto, 2006: 115). Jatuhnya harga kopi tentunya menjadi pukulan hebat bagi pemerintah Belanda karena saat itu kopi termasuk komoditi ekspor andalan Belanda. Kondisi keuangan pemerintah kolonial semakin diperparah dengan berkobarnya Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Oleh karena itu pemerintah kolonial berupaya untuk memulihkan kondisi keuangannya.

Pada tahun 1829 Johannes Van Den Bosch menyampaikan usulan kepada Raja Belanda untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mengeksploitasi tanah jajahan melalui kebijakan *cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa. Pada bulan Januari 1830, Van Den Bosch tiba di Jawa dan diangkat sebagai Gubernur Jenderal yang baru (Ricklefs, 2008: 260).

Menurut Nugroho Notosusanto (1993: 99-100) ketentuan pokok *cultuurstelsel* terdiri dari:

- a. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman ekspor.
- b. Tanah yang disediakan penduduk tidak lebih dari seperlima bagian.
- c. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman ekspor tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
- d. Tanah untuk tanaman ekspor dibebaskan dari pajak.
- e. Tanaman ekspor yang dihasilkan, wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda; jika nilai hasil tanaman ekspor ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisihnya diserahkan kepada rakyat.

- f. Panen tanaman ekspor yang gagal menjadi tanggungan pemerintah.
- g. Penduduk desa menggarap lahan di bawah pengawasan kepala-kepala mereka.

Berdasarkan ketentuan pokok *cultuurstelsel* tersebut, Belanda sama sekali tidak menunjukkan gelagat untuk mengeksploitasi rakyat. Melainkan seperti bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara rakyat dengan Belanda. Sekilas kita akan percaya bahwa *cultuurstelsel* memperhitungkan kepentingan rakyat. Hal tersebut semakin diperkuat dengan dibuatnya aturan pencegahan penyalahgunaan *cultuurstelsel*.

Aturan pencegahan penyalahgunaan *cultuurstelsel* memuat bahwa besar pajak yang ditentukan hanya sekitar 20% dan jika hasilnya melebihi nilai sewa tanah maka lebihnya akan diberikan kepada penanam, adat-istiadat yang sudah turun temurun dijamin oleh pamong praja, serta persetujuan *cultuurstelsel* dibuat oleh rakyat (Wiharyanto, 2006: 115-116). Meskipun telah dibuat aturan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan yang menyengsarakan rakyat. Seperti yang disampaikan Ricklefs (2008: 260) penyerahan hasil panen yang semula ditentukan sebesar 20% kemudian berubah menjadi 33%. Bentuk lain dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa adalah adanya unsur kekerasan terhadap rakyat selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Selain itu dalam praktiknya tanah-tanah milik rakyat yang digunakan untuk kepentingan tanam paksa sering mencapai separuh atau lebih dari tanah milik rakyat (Nugroho Notosusanto, 1993: 102). Hal itu tentu menyimpang dari ketentuan pokok *cultuurstelsel* yang menyatakan bahwa tidak lebih dari seperlima tanah rakyat yang digunakan untuk kepentingan Belanda.

Kondisi yang demikian menyebabkan timbulnya kritik dari beberapa tokoh Belanda, diantaranya Douwes Dekker yang menyampaikan kritiknya melalui sebuah buku yang berjudul *Max Havelaar*. Douwes Dekker menggunakan nama samara Multatuli dalam buku karangannya yang artinya “aku yang banyak menderita” (Sagimun, 1989: 6-7). Dengan adanya desakan dari kaum liberal, kemudian disusunlah peraturan-peraturan baru yang meniadakan penyelewengan-penyelewengan Sistem Tanam Paksa. Secara berangsur-angsur tanam paksa dihapuskan. pribumi.

Pemerintah kolonial kemudian menerapkan kebijakan baru yang disebut dengan Politik Liberal. Politik Liberal merupakan haluan ekonomi baru yang lebih bebas.

Dimana perusahaan-perusahaan swasta maupun asing diberi kesempatan untuk menanamkan modalnya pada perkebunan maupun perusahaan yang ada di Hindia Belanda. Dengan demikian Hindia secara tidak langsung dijajah oleh kaum kapitalis. Sama halnya dengan Sistem Tanam Paksa, Politik Liberal tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan pribumi sehingga menimbulkan kritikan dari golongan etis Belanda. Tokoh dari golongan etis yang terkemuka bernama van Deventer mengkritik kebijakan pemerintah kolonial melalui artikelnya yang berjudul *Een Eereschuld* atau Hutang Kehormatan. Artikel tersebut dimuat dalam jurnal *De Gids* pada tahun 1899. *Een Eereschuld* memuat tuntutan agar Belanda membayar hutang budi pada bangsa Indonesia melalui tiga sila sebagai slogannya yakni pendidikan, irigasi, dan emigrasi (Soemarsono Moestoko, 1986: 108).

Dengan adanya tuntutan dan kritikan dari berbagai kalangan, menyebabkan pemerintah Belanda untuk mengubah kebijakan politik kolonial yang diterapkan di Indonesia. Tuntutan dan kritikan tersebut nampaknya mendapat angin segar pada peralihan abad ke-19 ke-20. Pada tanggal 17 September 1901 Ratu Wilhelmina mengemukakan gagasan pembaharuan politik bagi tanah jajahan dalam pidato kenegaraan yang berjudul *Etische Richting* (Haluan Etika). Dalam pidatonya tersebut, Ratu Wilhelmina menyampaikan penetapan politik kolonial baru terhadap Indonesia yang disebut Haluan Etika (Moedjanto, 1988: 21). Dengan demikian muncullah gagasan baru dalam pembaharuan politik di Hindia Belanda yang berorientasi untuk memajukan kesejahteraan pribumi.

Pelaksanaan Politik Etis

Program-program yang dicetuskan oleh van Deventer untuk mewujudkan tercapainya Politik Etis meliputi irigasi, edukasi, dan emigrasi. Jika dilihat dengan seksama, ketiga program tersebut memang mengarah pada perbaikan kehidupan pribumi. Akan tetapi tercapai atau tidaknya perbaikan tersebut sangat bergantung kepada pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan irigasi atau pengairan bertujuan untuk mengairi sawah-sawah milik pribumi. Dengan adanya perbaikan fasilitas di bidang pertanian, pemerintah Belanda berharap agar hasil pertanian meningkat sehingga dapat memajukan kesejahteraan

pribumi. Akan tetapi harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena pada kenyataannya irigasi yang dibangun Belanda bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat pribumi. Seperti yang disampaikan Sagimun (1989: 10) bahwa pembangunan irigasi lebih dominan digunakan untuk kepentingan perkebunan-perkebunan milik kaum penanam modal. Meskipun demikian, penduduk Jawa juga turut menikmati manfaat dari pembangunan irigasi tersebut, khususnya di daerah-daerah perkebunan gula yang menyewa tanah dari petani atas dasar rotasi.

Program Politik Etis berikutnya adalah emigrasi. emigrasi yang dilakukan pemerintah kolonial, bukan semata-mata karena faktor pertumbuhan penduduk, melainkan ada faktor lain yaitu kepentingan ekonomi lainnya. Antara tahun 1885-1900 jumlah penduduk bertambah 30%, sedangkan sawah pengairan hanya bertambah 5,7% dan tanah pertanian lainnya 16% (Nugroho Notosusanto, 1993: 42). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan luas lahan pertanian. Hal itulah yang kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk membuka lahan pertanian yang baru. Pulau Sumatera dipilih pemerintah kolonial untuk pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan yang baru. Dalam rangka pembukaan lahan perkebunan baru tersebut pemerintah melakukan emigrasi guna memenuhi tenaga kerja pada lahan baru tersebut.

Mengenai program edukasi sebenarnya pemerintah kolonial sudah menyelenggarakan pendidikan sejak berdirinya VOC untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga pembantu dengan biaya yang murah. Berkaitan dengan dicetuskannya edukasi dalam asas trilogy Politik Etis, maka penyelenggaraan pendidikan pada masa Politik Etis mengalami perubahan kebijakan dari waktu sebelumnya. Menurut Sumarsono Mestoko (1986: 108) Politik Etis diarahkan untuk kepentingan penduduk pribumi dengan cara memajukan penduduk pribumi melalui pendidikan secara Barat. Sedangkan van Deventer menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus diarahkan kepada tujuan untuk membebaskan rakyat secara berangsur-angsur dari ketidakmatangan yang dipaksakan agar berdiri di atas kaki sendiri (Nasution, 1995: 16). Pernyataan van Deventer tersebut tersirat makna bahwa terselenggaranya pendidikan bagi pribumi agar mereka segera terlepas dari penjajahan dan merdeka sesegera mungkin.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kolonial melaksanakan pendidikan secara selektif dan diskriminatif. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan stratifikasi sosial yang ada pada saat itu, meliputi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Diperluasnya pengajaran dan pendidikan Barat bagi anak-anak pribumi, maka sejak tahun 1901 pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan.

Pada masa Politik Etis, J.H. Abendanon pernah mengusulkan agar Sekolah Rendah Eropa (*Europesche Lagere School*) terbuka bagi anak-anak pribumi. Usulan tersebut disetujui dan pada tahun 1903 anak-anak pribumi diperbolehkan mengenyam pendidikan di ELS (Nasution, 1995: 100). Selain Pendidikan Rendah, Pendidikan Lanjutan seperti *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) mulai dibuka di Bandung dan Yogyakarta pada tahun 1903. Pada tahun yang sama sekolah-sekolah kejuruan pun mulai didirikan seperti Sekolah Pertukangan (*Ambachts Leergang*), Sekolah Teknik (*Technisch Onderwijs*), Sekolah dagang (*Handel Onderwijs*), Sekolah Pertanian (Sumarsono Mestoko, 1986: 111-118).

Untuk memenuhi tenaga profesional seperti guru dan dokter pada masa Politik Etis maka pemerintah kolonial mengembangkan Sekolah Keguruan dan Sekolah Tinggi Kedokteran. Sekolah Keguruan di Hindia Belanda kemudian dibedakan berdasarkan bahasa pengantarnya. *Normaalschool* menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa pengantar, sedangkan *Kweekschool* dan *Hollandsch Inlandsche Kweekschool* berbahasa pengantar Belanda serta lulusannya berpeluang untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah. Sekolah Kedokteran yang semula bernama Sekolah Dokter Djawa kemudian mengalami perubahan menjadi *School Tot Opleiding Van Inlandsche Arsten* (STOVIA) yang menerima lulusan ELS dan menggunakan bahasa Belanda sebagai Bahasa pengantar.

Dengan diselenggarakannya pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi, maka semakin lengkap sistem pendidikan di Hindia Belanda. Pendidikan Barat telah memberi sedikit dampak positif bagi perkembangan pribumi. Pendidikan Barat telah memperluas wawasan pribumi mengenai paham-paham Barat seperti liberalism dan nasionalisme, yang kemudian akan membangkitkan kesadaran nasional anak-anak pribumi untuk bangkit melawan penjajahan.

Perkembangan Politik di Hindia Belanda

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda bukan semata-mata untuk mencerdaskan pribumi, melainkan disertai kepentingan-kepentingan politik antara lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang usaha ekonomi dan birokrasi pemerintahan. Selain itu, pendidikan juga dijadikan sebagai alat politik untuk mempertahankan perbedaan status sosial. Terjadi diskriminasi yang sangat jelas antara pendidikan bagi anak-anak pribumi dengan anak-anak Belanda. Pendidikan bagi anak-anak Belanda dan pribumi golongan atas lebih diutamakan daripada pendidikan pribumi golongan biasa.

Buruknya nasib rakyat pribumi di bidang pendidikan telah dibuktikan oleh laporan-laporan yang ditulis orang Belanda bahwa 90% rakyat pribumi masih buta huruf sewaktu Belanda meninggalkan Hindia Belanda. Laporan tersebut diantaranya ditulis oleh Dr. T. Lintum dan Zeeman yang mengatakan bahwa di antara 30 juta penduduk di Jawa hanya 60.000 yang dapat mengenyam pendidikan rendah (Kansil, 1977: 24). Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Sagimun M.D (1989: 40) bahwa pada tahun 1930 berdasarkan data sensus penduduk hanya 6,44% saja rakyat Indonesia yang dapat membaca dan menulis, sisanya buta huruf. Dari data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa politik etis tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi pribumi.

Meskipun demikian, bukan berarti pendidikan kolonial sama sekali tidak memberi keuntungan bagi pribumi. Pendidikan kolonial memberi sedikit manfaat bagi pribumi. Pendidikan bercorak Barat memang tidaklah sesuai dengan kondisi kultur di Indonesia. Akan tetapi, berkat pendidikan Barat anak-anak pribumi terpengaruh oleh paham-paham baru seperti Liberalisme, Nasionalisme, dan Sosialisme melalui literatur-literatur barat yang mereka baca (Kansil, 1977: 27). Dapat dikatakan bahwa pendidikan Barat di Hindia Belanda telah berhasil mengubah pola pikir anak-anak pribumi menjadi berkembang dan mulai sadar dengan kondisi bangsanya yang terbelakang. Selain itu pendidikan Barat juga telah melahirkan golongan baru di masyarakat yang disebut sebagai golongan terpelajar atau cendekiawan.

Jumlah pelajar yang tergolong sebagai elite baru jumlahnya memang masih sedikit, tetapi di dalam diri mereka telah tumbuh dan berkembang rasa kebangsaan, gagasan-gagasan dan rasa tanggung jawab untuk mengubah dan memperbaiki taraf

hidup bangsanya. Menurut Edward Shils (dalam Aswab Mahasin dan Ridwan (eds.), 1983: 238-239) pada tahap pertama kaum cendekiawan memiliki peran memperjuangkan hak hidup bangsa hingga mengajarkan ide kebangsaan yang sebenarnya. Kaum cendekiawan juga dianggap sebagai pelopor kehidupan politik di tanah jajahan. Pendapat Edward Shills tersebut tidaklah berlebihan jika mengingat bahwa berdirinya organisasi-organisasi politik di Hindia Belanda dipelopori oleh kaum cendekiawan.

Kegagalan-kegagalan perlawanan bersenjata yang pernah dilakukan oleh pejuang-pejuang terdahulu seperti Sultan Agung Mataram, Pangeran Diponegoro, Pattimura dan lain sebagainya telah memberikan kesadaran bagi kaum cendekiawan untuk mengubah strategi cara-cara perlawanan terhadap penjajah. Mereka tidak lagi mengangkat senjata untuk melawan kolonialisme, melainkan berjuang melalui organisasi-organisasi.

Adapun corak organisasi yang didirikan di Hindia Belanda terdapat dua aliran besar yakni aliran *cooperator* dan *non cooperator*. Aliran *cooperator* memiliki pandangan bahwa kemerdekaan ekonomi harus diutamakan terlebih dahulu daripada kemerdekaan politik. Aliran bersifat lunak dan dapat bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Sedangkan aliran *non cooperator* bersikap tegas untuk tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Mereka memiliki semboyan "*self reliance non mendicancy*", yang artinya segala sesuatu harus dicari dengan kepercayaan diri sendiri dan tidak dengan sikap seperti orang minta-minta (Kansil, 1977: 25). Meskipun berbeda aliran, pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu melepaskan diri dari belenggu kolonialisme.

Pada awalnya corak organisasi yang didirikan masih berasas kedaerahan dan belum secara gamblang melakukan tindakan-tindakan politik. Hal itu disebabkan karena adanya aturan pemerintah Belanda pasal 111 *Regerings Reglement* (RR) yang melarang berdirinya perkumpulan-perkumpulan politik (Moedjanto, 1988: 28). Adanya RR 11 telah menunjukkan bahwa pemerintah kolonial selalu mempunyai cara-cara licik untuk mengukuhkan kekuasaannya di tanah jajahan. Sehingga pada saat itu tidak memungkinkan jika Budi Utomo bergerak secara terang-terangan di bidang politik. Meskipun keanggotaannya masih terbatas dan belum secara gamblang menyebutkan cita-cita kemerdekaan sebagai tujuan utamanya, Budi Utomo telah memberi warna baru

dalam sejarah pergerakan di Hindia Belanda. Sehingga layak apabila pemerintah menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo yakni 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Berdirinya Budi Utomo kemudian disusul dengan organisasi-organisasi pada awal masa pergerakan lainnya seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Jong Java, *Indische Partij*, Jong Sumateranen Bond. Organisasi-organisasi yang lahir pada awal pergerakan nasional tersebut belum berhasil melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan tegas di bidang politik. Seiring terbukanya pemikiran para kaum terpelajar, maka corak organisasi mengalami perubahan mengarah pada timbulnya rasa kebangsaan serta melakukan tindakan nyata di bidang politik. Salah satu organisasi yang melakukan tindakan nyata di bidang politik adalah Perhimpunan Indonesia. Tindakan nyata Perhimpunan Indonesia ditunjukkan dengan penggunaan kata “Indonesia” pada nama organisasinya untuk menegaskan identitas suatu bangsa meski saat itu masih menjadi bangsa yang terjajah.

Pada tahun 1927 Perhimpunan Indonesia ikut serta dalam Kongres Liga Anti Kolonial yang diadakan di Brussel (Kansil, 1977: 40). Hal tersebut membuktikan bahwa Perhimpunan Indonesia pergerakannya sangat luas hingga mampu menjalin hubungan internasional. Dalam kongres tersebut delegasi Indonesia di bawah pimpinan Moh Hatta berhasil mencapai resolusi yang menyatakan bahwa Liga Anti Kolonial tersebut menyatakan bersimpati terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia dan bersedia mendukungnya. Selain itu hasil yang juga dicapai dalam kongres tersebut adalah tuntutan terhadap penghapusan *interneringen* yang terjadi terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Tentu saja hal itu mengundang kekhawatiran pihak pemerintah kolonial sehingga para pengurus Perhimpunan Indonesia ditangkap. Selain Perhimpunan Indonesia, terdapat organisasi yang juga secara tegas menyatakan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI mencanangkan program-program yang sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga berhasil memperoleh simpati dari masyarakat luas. Propaganda yang dilakukan PNI dianggap mengancam kedudukan pemerintah kolonial sehingga pergerakan PNI dibatasi.

Antar organisasi-organisasi pergerakan kemudian menyadari akan pentingnya suatu fusi untuk memupuk persatuan dan nasionalisme. Organisasi-organisasi dewasa atas inisiatif PNI kemudian bergabung ke dalam PPPKI pada tanggal 17 Desember 1927. Hal tersebut mendorong organisasi-organisasi pemuda untuk segera membentuk badan sentral. Para pemuda sepakat untuk membicarakan masalah fusi pada sebuah “Kerapatan Besar” yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda II. Dalam kongres tersebut memang belum berhasil membentuk suatu fusi organisasi-organisasi pemuda, akan tetapi Kongres Pemuda telah melahirkan sebuah ikrar Sumpah Pemuda yang mengandung nilai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dimana ketiga nilai tersebut merupakan dasar dari persatuan dan nasionalisme di Indonesia.

Krisis ekonomi dunia yang terjadi sekitar tahun 1929-1930 telah mengakibatkan pemerintah kolonial membatasi kegiatan organisasi pribumi. Peranan beberapa organisasi pada saat itu melemah. Meskipun demikian hal tersebut tidak menyurutkan semangat para kaum elite untuk mendirikan fusi yang lain, yang bernama GAPI. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini cukup gigih. Akan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Perang Dunia II yang terjadi telah mengakibatkan kondisi politik internasional semakin memburuk, sehingga tuntutan GAPI untuk mewujudkan Indonesia Berparlemen tidak dapat dikabulkan.

Simpulan

Penyelenggaraan pendidikan pada masa Politik Etis berhasil melengkapi jenjang pendidikan dari rendah hingga tinggi bagi anak-anak pribumi. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat juga terbuka bagi anak-anak pribumi. Dengan memperoleh pendidikan Barat, maka pengetahuan anak-anak pribumi mengenai paham-paham Barat seperti Liberalisme dan Nasionalisme semakin luas. Hal tersebut yang kemudian memicu lahirnya golongan pribumi terpelajar dan membangkitkan kesadaran nasional dalam diri mereka untuk bangkit melawan penjajahan. Golongan inilah yang kemudian melakukan perjuangan melalui organisasi pergerakan.

Corak organisasi pergerakan pada awalnya masih bersifat kedaerahan dan belum melakukan tindakan tegas di bidang politik. Seiring berjalannya waktu maka corak organisasi pergerakan mulai berkembang mengarah pada tindakan politik yang nyata.

Hal itu ditunjukkan dari propaganda-propaganda yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional untuk menentang penjajahan dan menyuarakan kemerdekaan.

Dinamika politik di Indonesia mengalami masa pasang surut. Krisis ekonomi dunia yang terjadi sekitar tahun 1929-1930 telah mengakibatkan pemerintah kolonial membatasi kegiatan organisasi pribumi. Peranan beberapa organisasi pada saat itu melemah. Meskipun demikian hal tersebut tidak menyurutkan semangat para kaum elite untuk mendirikan suatu organisasi fusi yang bernama GAPI. Meskipun usaha yang dilakukan cukup gigih akan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Perang Dunia II yang terjadi telah mengakibatkan kondisi politik internasional semakin memburuk, sehingga tuntutan GAPI untuk mewujudkan Indonesia Berparlemen tidak dapat dikabulkan.

Daftar Pustaka

- Kansil, C. S. T. dan Julianto. (1977). *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kartodirdjo, Sartono. (1999). *Pengantar Sejarah Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahasin, Aswab dan Natsir, Ismed (Eds). (1983). *Cendekiawan dan Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Mestoko, Soemarsono. (1985). *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20: Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notosusanto, Nugroho. (1993). *Sejarah Nasional Hindia Belanda IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Diterjemahkan oleh: Dharmono. Jakarta: Serambi.
- Sagimun M. D. (1989). *Peranan Pemuda: Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wiharyanto, A. K. (2006). *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

